

PERTUMBUHAN EKONOMI: ANALISIS INDUSTRI HALAL DAN ASET KEUANGAN SYARIAH DI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Imsar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara imsar@uinsu.ac.id,

Purnama Ramadani Silalahi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara purnamaramadani@uinsu.ac.id

Abdul Fattah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara fattahab1995@gmail.com

Abstract

A halal lifestyle should not just be a trend in Indonesia. A halal lifestyle should be the most important and inseparable part of all aspects of our lives, be it food and drink, medicine, tourism, beauty, energy and so on. The aim of this research is to analyze the short-term and long-term influence of the halal industry and sharia financial assets on economic growth in NTB, the potential development of the halal industry and the challenges and obstacles in this regard. The method used in this research is a Mix Method research method, namely using a quantitative approach with the Vector Autoregressive (VAR) Model and a qualitative approach, namely in-depth interviews (in-depth interviews). From this research, the results obtained are that the halal industry has a positive and significant effect on the economic growth of West Nusa Tenggara Province. Assets of sharia financial institutions have no effect on the economic growth of West Nusa Tenggara Province.

Keywords: halal industry, economic growth, sharia financial assets

Pendahuluan

Gaya hidup halal seharusnya bukan sekedar trend yang ada di Indonesia. Gaya hidup halal sudah seyogyanya menjadi bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari seluruh lini kehidupan kita baik itu makanan dan minuman, obatobatan, pariwisata, kecantikan, energi dan sebagainya. Landasan Kewajiban halal ini tentunya bukan sekedar memberikan kepastian halal bagi konsumen muslim,

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

namun kepada siapa saja yang akan mengkonsumsi atau menggunakannya. Esensinya Gaya hidup halal tentu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan jaminan kualitas yang baik dari barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

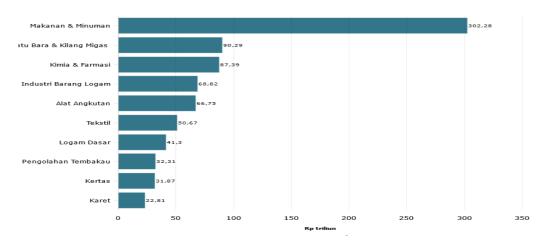
Kementerian Agama melalui UU No 26 Tahun 2019 menegaskan bahwa produk impor yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia akan diwajibkan bersertikat halal (Kemenperin, 2023). Kewajiban ini akan bertahap dan juga akan lebih difokuskan pada produk makanan dan minuman terlebih dahulu dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 19 Oktober 2024. Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Airlangga Hartanto dalam acara "Indonesia Halal Industry Award" (IHYA) 2022 di Jakarta mengungkapkan Indonesia sebagai Negara muslim terbesar mempunyai konsumsi mayoritas vang besar dalam membelanjakan produk halal dan mendapatkan layanan halal yakni sebesar USD 184 di tahun 2020 dan diperkirakan pada tahun 2025 mencapai USD281,6 (Hartanto, 2022). Namun demikian, antuas pemerintah belum sejalan dengan penerapan kebijakan yang sedang berjalan.

Kebijakan ini dinilai cukup lambat dan terkesan belum siap menyediakan fasilitas sertifikasi halal bagi produsen (Adamsah, 2022). Penelitian Fathoni memaparkan bahwa tantangan industry halal di Indonesia disebabkan oleh tantangan internal dan eksternal (Fathoni, 2022). Tantangan Internal industry halal diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat muslim akan informasi, wawasan dan penggunaan barang dan jasa halal. Penelitian Kartika (2020), Nusran (2018), menemukan faktor kesadaran konsumsi halal dipengaruhi oleh religiusitas dan keyakinan agama penggunanya. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat keyakinan agama seseorang maka semakin tinggi pulak kesadarannya menggunakan produk halal (Silalahi, 2021). Sementara itu, masyarakat umumnya menganggap bahwa produk yang beredar dipasaran adalah produk halal padahal hal tersebut belum tentu halal (Pryanka, 2018).

Tantangan internal lainnya yakni regulasi terkait sertifikasi halal yang terkesan lambat dan tidak massif. Program ini belum sebenuhnya didukung oleh

regulasi dan aturan pendukung bagi Sehati yang diterbitkan pemangku kebijakan lainnya, misalnya dari kepala daerah, DPRD, asosiasi UMK, dan lingkungan kementerian terkait. Semua kebijakan masih berada dalam level pusat bahkan aggaran di BPJPH masih kecil, hanya sekitar 114 milyar rupiah, padahal program Sehati diharapkan akan mampu mendongkrak perolehan 10 juta sertifikat halal gratis (Khasanah, 2022). Sertifikasi Halal dianggap sebagai hambatan oleh beberapa pihak terutama dari UMKM. Memperoleh label Halal dari otoritas untuk produknya telah memberatkan dan mahal. Beberapa masalah yang umumnya diidentifikasi adalah tarif, masa berlaku dan waktu pemrosesan sertifikat penerbitan. Beberapa UMKM beroperasi di daerah terpencil menemukan bahwa ini faktor dapat membahayakan eksistensi bisnis mereka.

Padahal UMKM sebagai penopang industri makanan dan minuman di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 33,92% terhadap Industri Pengolahan. PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencatat sektor industri mencapai Rp877,82 triliun pada kuartal II-2022. Nilai tersebut porsinya mencapai 17,84% dari total PDB yang nilainya Rp4,29 Triliun pada periode sama. Sektor industri berhasil tumbuh 4,01% pada kuartal II-2022 dibanding kuartal II-2021 (*year on year*/yoy). Dengan capaian tersebut, sektor industri berkontribusi sebesar 0,82% terhadap pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,44% (yoy) pada kuartal kedua tahun ini. Pertumbuhan sector industry ini ditopang oleh subsector mamin, batubara, kimia dan farmasi, industry barang logam, tekstil dan sebagainya (Kusnandar, 2022). Berikut besaran PDB sector Industri menurut subsektornya pada Kuartal II-2022.



Sumber: Databokskatadata.com

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Subsektor makanan dan minuman ini menjadi subsector yang paling berdampak pada peningkatan PDB sektor Industri yakni sebesar Rp 302,28 Triliun, disusul oleh subsector batubara 90,29 Triliun, Kimia dan Farmasi sebesar 87,39, Industri barang logam 68,82. Dan terakhir karet 22,81. Sementara itu, tekstil berada pada urutan ke-6. Padahal trend mode fashion di Indonesia sangat beragam dan terus berkembang.

Dalam pemulihan ekonomi global, ekonomi syariah telah menjadi agenda utama di berbagai Negara. Ekonomi Syariah dan industry halal dijadikan sumber mesin pertumbuhan baru yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi diberbagai Negara. *Economy Report* 2022 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34% dari pengeluaran halal global. Di sektor makanan halal, Indonesia merupakan konsumen terbesar kedua di dunia, sementara di sektor kosmetik halal menjadi konsumen terbesar keempat di dunia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi pariwisata dengan kearifan lokal dan sumber daya alam yang melimpah, NTB menjadi salah satu destinasi pariwisata halal Indonesia. Pariwisata halal atau akrab dikenal *muslim-friendly tourism* ini menjadi salah satu sektor yang berpotensi kuat dalam pengembangan ekonomi Syariah NTB. Potensinya besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi Syariah di NTB cukup pesat, khususnya untuk sektor pariwisata atau *muslim-friendly tourism* dan dunia makanan halal. Hal ini terkait dengan komitmen Pemda-nya untuk menjadikan NTB sebagai Pusat wisata halal dan pengembangan ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian Utomo dkk (2021) bahwa literasi keuangan syariah, sikap dan kesadaran sangat mempengaruhi niat pemilik bisnis untuk menggunakan produk keuangan syariah. Santoso (2019) mengungkapkan bahwa peran lembaga keuangan syariah implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Temuan penelitian Susilawati, 2020 mengungkapkan bahwa ada tiga sektor bisnis halal yang diyakini lebih rentan pandemi Covid-19 guna memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional yakni Keuangan halal, halal industri makanan dan fashion halal. Hal ini diperkuat oleh

Jailani (2022) melalui penelitiannya menemukan bahwa gaya hidup di sektor perbankan syariah, pariwisata halal, dan makanan halal secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kajian Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

Suatu negara yang outputnya meningkat dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diukur dengan nilai Produk Domestik Brutonya. Berdasarkan harga berlaku dan konstan, nilai output ini merupakan ukuran persentase pertumbuhan ekonomi. Perubahan nilai PDB mengungkapkan besaran output periode tertentu dengan konsep pertumbuhan ekonomi dalam satu periode, sebagai berikut:

$$GT = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} x \ 100 \%$$

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik mengenai populasi optimal telah menjelaskan keterkaitan yang ada antara jumlah tenaga kerja dan tingkat output, atau GDP, dimana keadaan pertumbuhan terbaik akan terjadi ketika total produksi tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja. Sebagai penyempurnaan dari klasik tersebut, teori pertumbuhan teori-teori neoklasik mengasumsikan bahwa tingkat teknologi dan laju depresiasi adalah konstan, serta laju pertumbuhan penduduk konstan, dan tidak ada ekspor-impor, tidak ada sektor pemerintah, dan bahwa seluruh masyarakat di daerah memiliki pekerjaan. Menurut Romer, faktor teknologi juga merupakan komponen endogen pertumbuhan ekonomi karena individu dapat memiliki dan menggunakan teknologi tanpa mengeluarkan biaya.

Industri Halal

Industri halal terdiri dari kata industri dan halal. KBBI mendefenisikan industry sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peraatan. Seperti mesin. Sedangkan halal artinya diizinkan (tiak dilarang oleh syarak) (KBBI, 2019). Industri halal merupakan kegaitan

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Semntara itu, produk halal dalam UU no 33 tahun 2014 yakni produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepaskan dari tiga aspek penting, yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin mengajarkan setiap muslim untuk senantiasa sejalan dnegan Al-quran dan Sunnah. Dari segi kualitasnya, setiap muslim bukan hanya harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, namun juga ke-tayyib-an (baik) untuk kesehatan. Sebagaimana dalam Al-quran Q.S Al-Maidah 88 dan Q.S. An-Nahl: 114.

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S Al-Maidah; 88)

Beberapa klaster sector industry halal yang dapat dikembangkan oleh Indonesia adalah:

a. Makanan dan Minuman Halal

Kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik telah tertuang dalam Alquran Surah An-Nahl (16): 114. Dengan Mengkonsumsi makanan danminuman yang halla diyakini dapat memberikan peningkatan kualitas nutrisi dan kejernihan hati dalam mennetukan sikap.

b. Pariwisata Halal

Jika kepulauan yang ada di Indonesia diberikan akses dan fasilitas yang memadai tentu akan banyak turin yang ingin berlibur dan meningkati panorama negeri Indonesia. sejumlah negara di Eropa, mereka kini mengembangkan pariwisata halal padahal Negara di Eropa bukan mayoritas Muslim. Ini adalah genre turisme yang ramah Muslim. Hal tersebut mencakup destinasi ramah Muslim, yaitu ada kandungan sejarah atau nilai Islam di dalamnya, seperti al-Hambra di Granada, dan berbagai situs warisan dinasti Islam di sana

c. Fashion Muslim

Busana Muslim menjadi daya tarik para perancang dan umat Islam di berbagai belahan dunia. Mereka menginginkan gaya elegan yang mempercantik penampilan, sehingga menambah percaya diri. Indonesia kini menjadi acuan perkembangan hal tersebut. Sejumlah perancang busana Muslim lahir dan tumbuh di negeri ini. Komunitas hijab juga bermunculan sebagai perkumpulan yang memperhatikan dan mengonsumsi berbagai busana Muslim terbaru.

d. Media dan Rekreasi halal

masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah karya kreatif berupa film dan animasi yang bermula dari novel.

e. Farmasi dan Kosmetik Halal

Produk obat-obatan dan kosmetik kini semakin menjadi daya tarik jika berlabel halal. Muslim Indonesia enggan mengonsumsi dua produk itu jika di dalamnya terdapat kandungan zat yang tidak halal.

f. Energi

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan tantangan pengembangannya, pemerataan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dapat dilakukan berdasarkan masing-masing unsur yang terdapat dalam analisis nilai industri energy terbarukan

Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah Indonesia kini bersaing bukan hanya dengan bank konvensional, tetapi juga lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari seluruh Negara-negara ASEAN. dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022. Peringkat ini masih jauh di bawah Malaysia yang berada pada urutan pertama, disusul Arab Saudi hingga Kuwait. Adapun total aset keuangan syariah RI berada pada posisi ke-7 terbesar dengan nilai US\$119,5 miliar. Meskipun demikian, sektor keuangan syariah di Indonesia masih memiliki prospek menjanjikan seiring dengan merger tiga bank anak usaha bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Keuangan Syariah di Indonesia dibagi dalam beberapa klaster yang berperan dalam menopang perekonomian. Berikut klaster dalam keuangan Syariah yaitu,

perbankan Syariah, pasar modal Syariah, jaminan social Syariah, zakat infaq shadakah dan wakaf

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Mix Method yakni dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Model Vector Autoregressive (VAR) dan pendekatan kualitatif yakni indept interview (wawancara mendalam). Metode VAR ini pertama kali diusulkan oleh Sims sekitar tahun 1980 (Gujarati, 2003). Model ini dipilih karena mampu menangkap peristiwa ekonomi dalam penelitian ini. Luasnya pengaruh hubungan jangka pendek antara industri halal dan aset keuangan syariah dan PDRB sebagai indikator perkembangan ekonomi NTB dari tahun 2015 hingga tahun 2021 dapat diperiksa menggunakan pendekatan VAR. EViews 10 digunakan untuk melakukan uji kointegrasi dengan teknik VAR. Sumber data kuantitatif ini diperoleh dari laporan statistik BPS, OJK dan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) *Report* dengan interpolasi data ke interval bulanan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB yakni Bapak I Nengah Gusla dan Kepala Kantor Perwakilan BEI Provinsi NTB yakni Bapak Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana.

Temuan Penelitian dan pembahasan

Hasil VAR

Temuan penelitian pada pendekatan kuantitatif di dapatkan bahwa:

Komponen PDRB, IH, dan AKS stasioner pada First Different dengan alpha 5% terlihat stasioner. Interpretasi hasil stasioner adalah sebagai berikut:

- Pada variabel PDRB terlihat nilai probabilitas pada First Different sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha 5% sehingga disimpulkan bahwa PDRB stasioner.
- 2) Variabel IH dapat dilihat nilai probabilitasnya pada First Different sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 05% sehingga dapat disimpulkan IH stasioner.

3) Pada variabel SKS terlihat nilai probabilitas pada First Different sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai alpha 5% sehingga disimpulkan bahwa AKS stasioner.

Tabel 1. Hasil Uji Stasioneritas

Variable	Unit Root	ADF t-Statistics	Mackinnon 5 % Critical Value	Probabiliy	Concl.
PDRB	Level	-1.859822	-2.892879	0.3498	No stationary
	First Different	-6.634179	-2.892536	0.0000	Stationary
IH	Level	-0.266882	-2.892879	0.9246	No Stationary
	First Different	-4.135930	-2.892879	0.0000	Stationary
AKS	Level	0.513664	-2.892879	0.9864	No Stationary
	First Different	-10.27644	-2.892879	0.0000	Stationary

Tabel 2. Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-1209.569	NA	32143327	25.79934	25.88051	25.83213
1	-733.5679	911.4917	1555.684	15.86315	16.18782	15.99429
2	-690.1687	80.33473*	748.7813*	15.13125*	15.69943*	15.36075*

Sumber: Data diolah

Perolehan uji lag optimum menunjukkan panjang lag optimal adalah 2. Tanda bintang terlihat hampir pada semua kriteria pada lag 2. Artinya pengaruh variabel industri halal dan aset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi NTB akan mengalami titik optimum pada lag 2

Tabel 3 Hasil Uji Kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)					
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**	
None At most 1 At most 2	0.125836 0.090609 0.002941	21.61436 9.107066 0.273931	29.79707 15.49471 3.841466	0.3204 0.3556 0.6007	

Sumber: Data diolah

Hal ini terlihat dari hasil pengujian bahwa semua probabilitas trace statistic lebih besar dari level alpha 5% dan nilai trace statistic lebih kecil dari nilai kritis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi antara Industri Halal, Aset Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan ini mempunyai hubungan keseimbangan jangka pendek antara IH, AKS dan PDRB. Karena tidak terkointegrasi maka pengujian dilanjutkan dengan Vector Auto Regression (VAR). Berdasarkan uji stasioner dan kointegrasi, hubungan IH, AKS dan PDRB bersifat stasioner dan seimbang dalam jangka pendek sehingga dapat dilakukan analisis kausalitas dan akan menunjukkan hasil yang valid dan reliabel. Analisis kausalitas ini menggunakan metode Granger. Hasil uji kausalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
AKS does not Granger Cause IH IH does not Granger Cause AKS	94	1.82414 11.0953	0.1673 5.E-05
PDRB does not Granger Cause IH	94	0.25679	0.7741
IH does not Granger Cause PDRB		1.96242	0.0308
PDRB does not Granger Cause AKS	94	12.0887	2.E-05
AKS does not Granger Cause PDRB		3.61891	0.1466

Nilai probabilitas IH pada PDRB sebesar 0.0308, dan nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Sedangkan nilai probabilitas PDRB pada IH sebesar 0.7741 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa Industri Halal dan PDRB memiliki hubungan kausalitas satu arah sedangkan PDRB pada IH tidak mempunyai hubungan sebab akibat.

Nilai probabilitas AKS pada PDRB sebesar 0.1466 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Sedangkan nilai probabilitas PDRB pada AKS sebesar 2.E-05 dan nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara Aset Keuangan Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi NTB.

Nilai probabilitas AKS pada IH sebesar 0.1673 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Sedangkan nilai probabilitas IH pada AKS

sebesar 5.E-05 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara Aset Keuangan Syariah dengan Industri Halal.

Hasil Estimasi VAR

Tabel 5. VAR Estimation Result

Endogenous Variable	Exogenous Variable	Coefficient	SE	T-Statistik
D(PDRB)	C	-0.237395	•	
	IH (-1)	0.021328	((0.01867)	[2.21125]
	AKS (-1)	0.013976	(0.00632)	[1.14228]
	R-squared	0.969662		
	Adj. R-squared	0.967570		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil estimasi untuk jangka pendek, Industri Halal mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di NTB hal ini dibuktikan melalui T-Statistiknya > dari T-Tabelnya (2.21125 > 1.661). Artinya sektor industri halal memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB yakni Bapak Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana. bahwa:

"Aset keuangan Syariah di NTB masih dalam proses pengembangan. Namun demikian pengembangannya belum terlalu signifikan. Untuk dibidang pasar modal sendiri. Kami dari kantor perwakilan BEI di NTB masih memperkenalkan produk-produk pasar modal yang konvensional dan untuk literasi ke pasar modal syariahnya belum terlalu mendalam dan belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan literasi inklusi pasar mdoalnya masih didominasi pada konvensional. Kantor perwakilan BEI sendiri pun di NTB ini baru dibuka pada tahun 2017. Sehingga kami masih berproses terus mengembangkan pasar modal syariah di NTB ini".

Bapak Gusti Bagus Ngurah Putra Juga menuturkan bahwa:

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

"Pada perbankan syariah, Bank NTB telah dikonversi menjadi Bank NTB Syariah terhitung sejak Oktober 2016 hingga diresmikan tanggal 13 September 2018. Sementara itu, izin dari OJK telah dikeluarkan sejak tanggal 4 September 2018 sesuai dengan surat keputusan dari OJK, tetapi pelaksanaannya baru bisa dijalankan tanggal 24 September 2018."

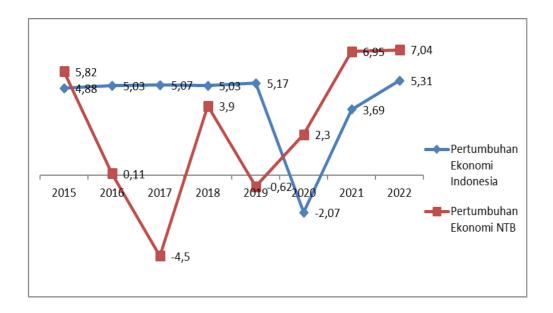
Terkait dengan kondisi umum pariwisata NTB peneliti mewawancara pimpinan Dinas Pariwisata NTB. Menurut pemaparan dari Bapak I Nengah Gusla bahwa:

"Indonesia merupakan negara yang sangat luas akan keindahan alam panorama alamnya menjadi salah satu provinsi yang menjadi tujuan dari wisatawan domestik maupun mancanegara karena NTB memiliki keindahan pantai yang masih Asri serta amat indah. kondisi umum pariwisata NTB terdiri dari 11 kawasan Strategis Pariwisata Daera (KSPD) 4 di Pulau Lombok dan 7 di Pulau Sumbawa, kondisi ini merupakan potensi pariwisata NTB yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. NTB tergolong provinsi yang tidak luas tetapi hampir seluruh pantai yang ada NTB baik itu di Lombok maupun di Mataram memiliki nuansa dan gelombang pantai yang bisa dinikmati oleh para wisatawan seperti Gili Trawangan Gili meno dan Gili Air yang memiliki gelombang air yang cukup tenang dan nuansa indah dapat dijadikan sebagai tempat bagi wisatawan untuk berjemur, bersepeda, berjalan-jalan, snorkeling dan berbelanja."

Pembahasan

Pengaruh industri halal dan asset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pertumbuhan Ekonomi Di NTB cenderung mengalami fluktuasi yang cukup cepat dari tahun 2015 hingga 2022. Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik dibawah ini:



Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah

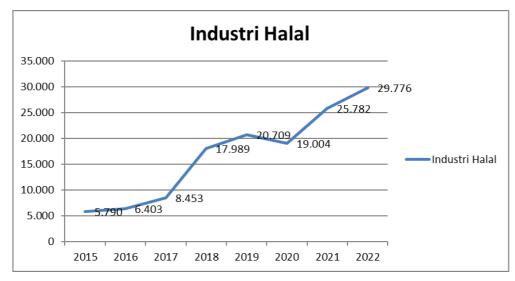
Berdasarkan grafik diatas PDRB NTB berdasarkan harga konstan di tahun 2015-2017 mengalami kontraksi yang mendalam hingga minus 4,5%. Pertumbuhan ekonomi NTB sangat bergantung pada sector tambang. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh berhentinya operasional sector tambang PT Newmont di Pulau Sumbawa. Rasionalisasi karyawan dan tenaga kerja, ditandai dengan beralihnya tenaga kerja mencari pekerjaan pada sektor yang sama di daerah lain, pengurangan jam kerja sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi sector lainnya. Kondisi ini sangat berdampak pada sirkulasi barang maupun jasa serta distribusinya (Irwan, 2020).

Indonesia melalui NTB mendapat penghargaan yang membanggakan yakni World's Best Halal Beach Resort, World's Best Halal Honeymoon Destination, dan World's Best Halal Tourism Destination. Hal ini menjadi perhatian penuh pemerintah setempat untuk mengembangkan perekonomian di NTB tanpa ketergantungan dari sector tambang. Adanya kondisi ini menarik perharian Gubernur NTB dan jajarannya untuk mengembangkan potensi industry halal dan asset keuangan syariah di NTB yang akhirnya menarik minat wisatawan local, maupun mancanegara untuk berwisata di NTB. Pemerintah daerah terus berkoordinasi denganpemerintah pusat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mengembangkan tempat-tempat wisata di NTB. Kerja keras ini mengantarkan

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

NTB menempati posisi teratas sebagai wisata halal terbaik di dunia menurut GMTI 2019. Kemudian keseriusan pemerintah daerah NTB ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2022 tentang Roadmap Nusa Tenggara Barat Halal Industrial Park tahun 2022-2025.

Berdasarkan pengujian data Industri halal mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji kausalitas Granger yang menunjukkan tingkat probabilitas sebesar 0,0168 atau kurang dari 0,05. Industri halal mempunyai pengaruh yang signifikan karena memberikan kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi riil. Karena didukung ekosistem halal yang baik. Penggunaan produk Halal tidak hanya akan berdampak pada PDB Indonesia tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan gaya hidup Halal global, sehingga berdampak positif pada Ekonomi islam Global.



Grafik. 2 Industri Halal NTB

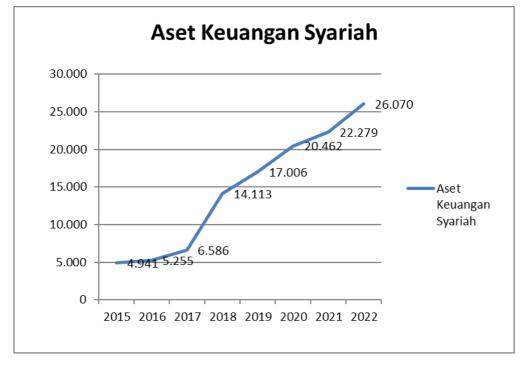
Sumber: Data diolah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa industry halal mengalami pemingkatan yang signifikan dari tahun 2017-2019. Namun adanya pandemic covid 19 membuat asset industry halal ini sempat mengalami penurunan. Pemprov NTB dalam mempercepat perekonomian berbasis industri mengeluarkan beberapa peraturan daerah yang tertuang dalam Perda no 13 tahun 2021-2024. Tujuan Perda ini untuk memayungi setiap pelaku bisnis dalam mewujudkan pembangunan industri nasional, industri daerah yang maju, berdasa saing dan mandiri. Kemudian Pemprov juga mengeluarkan Perda no 3 tahun 2020 terkait

pengembangan ekonomi kreatif berbasis IT, seni dan budaya. Lahirnya 2 perda ini belum sejalan dengann share sector iindustri terhadap PDRB NTB yang masih relative kecil dibawah 4 persen tahun 2020 (BPS, 2021). Hal ini disebabkan oleh masih relative lambannya proses UMKM naik kelas di Provinsi NTB. Dinas Koperasi UMKM provinsi NTB mencatat di tahun 2021 ada 103.284 UMKM terdapat 86.922 unit (84,16%) kategori UMKM mikro, 15.119 (14,5%) UMKM usaha kecil dan usaha menengah hanya 1243 (1,2%).

Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di NTB, Pemerintah NTB terus mengadakan event-event mancanegara yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan local untuk berkunjung ke NTB. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa pemerintah terus menerus berinovasi dalam meningkatkan industry halal di NTB tidak hanya pada sector pariwisatanya, namun juga sector makanan dan minuman halal, fashion muslim dan lain sebagainya. Dengan mayoritas penduduk NTB adalah muslim yakni 5,23 juta jiwa yakni 96% dari penduduk di NTB. Ini mempermudah pemerintah dalam menggaungkan NTB sebagai tempat wisata "Muslim Friendly".

Peningkatan industry halal di NTB sejalan dengan progres peningkatan asset keuangan syariah di provinsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Grafik 4. Asset Keuangan Syariah NTB

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

Meskipun terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset keuangan syariah dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, Hal ini sejalan dengan penelitian Andiansyah dan Sunaryo. Penyebab tidak signifikannya aset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh rendahnya indeks pangsa pasar dan inklusi keuangan syariah di NTB sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pangsa pasar keuangan syariah per Juni 2022 tercatat sebesar 10,41%, jauh lebih rendah dibandingkan pangsa pasar keuangan konvensional, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah NTB mengalami fluktuasi yakni dthaun 2016 inklusi keuangan NTB hanya mencapai 5,10%, tahun 2019 naik signifikan menjadi 22,05% pasca peralihan Bank NTB dikonversi menjadi bank NTB Syariah dimana kehadiran ini mendonkrak literasi dan inklusi keuangan syariah di NTB (Pemerintah Provinsi NTB, 2020). Bahkan kenaikan indeks literasi keuanga syariah ini sempat membuat NTB berada di posisi ketiga secara Nasional yang sebelumnya berada di posisi ke 23. Selanjutnya pendirian Bursa Efek Indonesia di Provinsi NTB ditahun 2017 juga membantu masyarakat mengetahui produk-produk pasar modal syariah. Namun demikian, tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah ini turun menjadi 13,51%.

Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik. yang mempengaruhi dan memotivasi orang untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung peningkatan indeks literasi keuangan syariah akan meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah seiring dengan semakin besarnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Faktor kedua, inovasi dan daya saing industri keuangan syariah masih kalah dibandingkan industri keuangan konvensional. Hal ini terlihat dari semakin terbatasnya inovasi produk keuangan syariah, semakin mahalnya harga produk dan layanan serta jaringan kantor yang tidak seluas industri keuangan konvensional sehingga belum bisa menjangkau masyarakat terutama di daerah terpencil. Pendirian ATM di berbagai wilayah di provinsi NTB juga masih sedikit bahkan di tempat-tempat wisata bank NTB syariah belum memiliki banyak kantor cabang dan ATM.

Untuk menuju kawasan industry halal dalam konteks ketersediaan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemprov NTB yakni:

a. Halal Asessement

Pengawasan kehalalan suatu produk perlu ada legitimasi dari unsur unsur terkait misalnya MUI (majelis ulama Indonesia) dalam hal memastikan bahwa produk produk yang dihasilkan dalam suatu industry telah di asessement kehalalannya dari mulai proses, distribusi dan produknya.

b. Halal education

Untuk mendukung terlaksananya dan dapat diterapkannya kawasan halal industry, maka edukasi tentang konsep halal perlu dilakukan secara simultan.

c. Halal with research development

Strategi yang juga sangat penting untuk mendukung kawasan industry halal adalah riset dan pengembangannya.

Ada beberapa hambatan dalam pengembangan industry halal di NTB. Hal ini terjadi pada hambatan pengembangan Gili Tramena yakni Lama Tinggal wisatawan di Tiga Gili Masih rendah, belum optimalnya pemasaran Pariwisata Gili Tramena, Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar di Kawasan Tiga Gili, Kerjasama pemanfaatan asset Pemprov NTB di Gili Trawangan dan Gili Air hingga saat ini masih belum terselesaikan, Penolakan pemberlakuakn one gate system oleh pelaku pariwisata Kawasan tiga gili. Selain itu rendahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif mendaftarkan HAKI dan sertifikat halal padahal hal ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Produk Lokal NTB dengan Sertifikasi Halal. Adapun kemungkinan kendala dalam proses sertifikasi halal ini yakni bahan yang berasal dari produk hewani dan bahan lain yang belum jelas kehalalannya, bahan tidak ber-SH, dan perlu penambahan auditor halal.

Selanjutnya tantangan lainnya yakni penerapan kawasan industri halal NTB ini merupakan hal yang baru yang mengombinasikan antara industri manufaktur dengan pariwisata secara terintegrasi. Namun demikian terkait SDM industri manufaktur NTB masih relative terbatas dan belum cukup berpengalaman dalam

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

malaksanakan konsep Halal Industrial Park (HIP). Kemudian ketersedian infrastruktur untuk pembangunan industri seperti ketersediaan listrik, air bersih danlain-lain masih relatif terbatas.

Adapun tantangan dari pengembangan industri halal di NTB ialah Kondisi ekonomi Global yang belum menentu, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang belum dapat diprediksi kapan berakhir. Sehingga memengaruhi keputusan investasi industri secara global dan mempengaruhi stabilitas kurs dalam negeri, Iklim industri dan pariwisata yang perlu terus dipupuk di NTB sehingga menyebabkan orang leluasa berinvestasi dan berwisata di NTB, Penganggaran pemerintah yang terbatas karena rendahnya pendapatan akibat terjadinya pandemi Covid-19 serta persiapan Pemilu 2024, Pola pembangunan program terintegrasi antar Organisasi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Dunia Industri dan Universitas yang belum terealisasi dengan baik.

Kesimpulan

Industri halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aset lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kunci sukses NTB dalam mengembangkan potensi Industri Halal diantaranya:

- a) Pengembangan Desinasi Pariwisata melalui: Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Kawasan Yang Di Dukung dengan Kualitas Pemenuhan Aspek 3 A (Amenitas, Aksesibilitas Dan Atraksi). Pengembangan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Melalui Penguatan Desa Wisata Dan Industri Pariwisata Mendorong Pertumbuhan Investasi Bidang Pariwisata
- b) Pengembangan SDM Pariwisata melalui:Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Parwisata dan Ekonomi Kreatif Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3) Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kelembagaan Pengelola/Organisasi/Lembaga dan Masyarakat Kepariwisataan.
- c) Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui: 1) Kondisi Ekonomi Global dan Nasional belum pulih 2) Promosi Pariwisata yang belum maksimal

- melalui BAS (Branding Advtising dan Selling) Potensi Pariwisata 3) Persaingan antar destinasi (DPSP) 4) Preferensi Wisatawan belum Maksimal untuk Meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas 5) Jumlah dan kualitas Event Pariwisata.
- d) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui: 1)Belum maksimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif selain subsektor Fashion, Kriya dan Kuliner. 2) Fasilitas Ruang Kreasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 3) Penguatan Daya Saing Produk Pelaku Ekonomi Kreatif untuk akses pasar yang lebih luas.
- e) Pengembangan Islamic Centre melalui: 1) Islamic Center sebagai pusat Edukasi, Rekreasi, intraksi pariwisata dan Pusat Peradaban 2)Ketersediaan Sarana prasarana dan Penataan Sarana sebagai daya tarik termasuk Menara 99 Islamic Center. 3) Media Komunikasi dan Publikasi termasuk teknologi informasi untuk akses informasi tentang IC 4) Islamic sebagai Pusat Peradaban 5) Paket Wisata Religi Terintegrasi dengan Islamic Center dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal

Daftar Pustaka

- Achdiat, Isnaeni, Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah Tahun 2022: Peluang dan Tantangan, pada webinar Kamis 27 Januari 2021.
- Adamsah, Bahtiar dan ganjar Eka Subakti. 2022. Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuan Ekonomi Indonesia. Indonesia Journal of Halal, vol 5 no 1.
- Admin. Pergub No. 61 Tahun 2022 ttg Roadmap NTB Halal Industri Park Tahun 2022 2025, dalma website www.jdih.ntbprov.go.id diposting pada 25 Mei 2022.
- Aprianti, Eka. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas bank rakyat Indonesia syariah di Indonesia, Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Februari 2022,
- Bakar, Abu., dkk Anaisis Fiqih Industrial halal, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 1 Januari-Juli 2021.
- Bidang IKP, OJK NTB : Bank NTB Syariah Dongkrak Literasi Keuangan Nasional, dalam website www.ntbprov.go.id diposting pada September

Imsar, dkk: Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Industri Halal dan Aset Keuangan Syariah di Nusa Tenggara Barat (NTB)

2020

- Bkpm.go.id, "Cara Mendaftar Dan Mendapatkan NIB Di OSS," https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss#:~:text=NIB atau Nomor Induk berusaha,dengan bidang usahanya masing-masing
- Charity, May Lim, Jaminan Produk halal di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14 No 1, Maret 2017
- Fathoni, Muhammad Anwar, 2020, Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan, Jurnal ilmiah Ekonomi Islam, vol 6 no 3
- IDN Financial, Ministry of Industry Launches IHYA 2022, https://www.idnfinancials.com, Oktober 2022.
- Irwan, Muhammad, dkk, Analisis Kualitas Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Maqasid Syariah, Elastisitas- Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol 2, No 2, 2020
- J. Boukhatem and F. Ben Moussa, "The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries," Borsa Istanbul Rev., vol. 18, no. 3, pp. 231–247, 2018.
- Jailani, Novalini dan Hendri Hermawan Adinugraha, The Effect of Halal Lifestyle on Economics Growth in Indonesia, Journal of Economics Research and Social Sciences, vol 6 No 1, Februari 2022.
- Kasanah, Nur, Potensi, regulasi dan problematikan Sertifikasi halal Gratis, Journal of Economics, Law and Humaities bol 1 no 2. 2022
- Kemenag.go.id, "Nasional DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK," last modified 2022, https://kemenag.go.id/read/dpr-dan-kementerian-dukung-sertifikasi-halal-gratis-10-juta-produk-halal-umk-kdmkz.
- Kemenperin, BBSPJIKFK Mendukung Penerapan Sertifikasi Halal, pada https://kemenperin.go.id, diposting pada 3 Januari 2023.
- Kementerian Perekonomian, Tak Hanya Miliki Domestik market yang besar, Indonesia juga berpeluang menjadi produsen halal terkemuka dunia, www.ekon.go.id, Desember 2022.

- KNKS, Indonesia's halal Industry: Thriving Domestic Halal Economy, Insight Islamic Economi Bulletin, 2019
- Kusnandar, Viva Budy, PDB Sektor Industri Menurut Subsektor (Kuartal II-2022), https://databoks.katadata.co.id, Agustus 2022
- Madjid, Sitti saleha. 2022. Analisis Peluang, tantangan dan Strategi industry halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid 19), Jurnal Pilar: Jurnal kajian Islam Kontemporer vol.3, No.1
- Moh Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," Islamika 1, no. 2 (2019): 116–132. KNEKS, Berita dna Kegiatan, https://kneks.go.id/beranda, 31 Maret 2023.
- Mustajab, Ridhwan, Kinerja Industri Makanan dan Minuman Naik 4,90% pada 2022, dalam https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kinerja-industri-makanan-dan-minuman-naik-490-pada-2022
- OJK, Kesiapan Industri Jasa Keuangan syariah dalam mendukung Sustainable Finance, dalam Webinar pada 17 Maret 2022.
- Santoso, Ivan Rahmat, et all., The Role of Islamic Financial Institution in the Digital Era: Case Study in Indonesia, ICIDS 2019: Precedin of the First International Conference on Islamic Development Studies, September 2019.
- Silalahi, S.A.F., Fachrurazi, F. and Fahham, A.M. (2022), "Factors affecting intention to adopt halal practices: case study of Indonesian small and medium enterprises", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 6, pp. 1244-1263. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152
- Sunaryo, Dimas Andhio dan Rahmatina Awaliah Kasri, Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 6, No 2, 2022
- Uswatun Khasanah, "Respon UMKM Dan Upaya BPJPH Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Melalui Halal Self Declare Di Kabupaten Bantul" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2022).
- Utomo, S.B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A. and Sudarsono, H. (2021), "Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 12 No. 5, pp. 992-1011. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0259